

Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat)

Putri Srie Handayani*

Pasca Sarjana Universitas Andalas, Limau Manis Pauh

*Correspondence e-mail: putrisrieandayani@yahoo.co.id

Abstract. *The purpose of this study was to determine the effect of Accountability and Functional Supervision on Regional Financial Management at the city Regional Financial Management Office (DPKD) in West Sumatera. This research is a type of quantitative research. The population in this study is the City Regional Financial Management Office (DPKD) in West Sumatera Province. The sampling method used judgement sampling as many as 4 cities, namely Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, and Payakumbuh and 250 DPKD employees as respondents. Data was collected by distributing questionnaires directly to the 250 employees. The data analysis technique used multiple linear regression with t test. The result showed that Accountability and Functional Supervision had an effect on Regional Financial Management.*

Keywords : *Accountability; Functional Supervision; Regional Financial Management*

Pendahuluan

Undang-undang No 22 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan sebuah paradigma baru terkait pelaksanaan otonomi daerah yang meletakkan otonomi penuh, luas, serta bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah ini sudah membeikan nuansa baru, yaitu perpindahan kewenangan pemerintah yang semula sentralis birokratik menjadi pemerintah yang desentralistik partisipatoris (Mardiasmo, 2002). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat, tidak dapat dilakukan pemisahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Yang menjadi permasalahan pada otonomi daerah bukan hanya pelimpahan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah saja, hal yang lebih penting yaitu 1)adanya keinginan meningkatkan efisiensi serta efektifitas terhadap pengelolaan sumber daya keuangan daerah, 2)meningkatkan kesejahteraan, 3)pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Oleh karena itu, semangat dalam hal desentralisasi, demokratisasi, transparansi serta akuntabilitas menjadi hal yang dominan terhadap proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya serta proses pengelolaan keuangan daerah khususnya (Ahmad, 2009).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan dalam ketentuannya bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dinilai menggunakan uang dan dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan tetap memperhatikan asas yang berlaku. Menurut (Abdul, 2007) Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Perubahan paradigma pengelolaan, laporan keuangan, serta pelaporan keuangan daerah secara signifikan dipengaruhi oleh era reformasi serta otonomi daerah. Pemerintah daerah mempunyai amanat melakukan pengelolaan dana publik guna terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah di berbagai bidang dan urusan.

Mardiasmo (2002) menjelaskan akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban yang bermula dari perencanaan, penyusunan, hingga ke tahap pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD serta masyarakat pada umumnya. Masyarakat berhak untuk mengetahui dan meminta pertanggungjawaban terhadap rencana maupun pelaksanaan anggaran yang dimaksud. APBD harus dipergunakan secara efisien dan juga efektif, oleh karena itu diperlukan suatu pengawasan yang merupakan unsur penting untuk: 1)peningkatan dayaguna aparatur pemerintah dalam melaksanakan semua tugasnya sehingga dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan juga berwibawa, 2)memastikan penyelenggaraan suatu kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana.

Pengawasan fungsional adalah salah satu pengawasan didalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik dari dalam ataupun luar lingkungan pemerintahan dan diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan peraturan UU yang berlaku (Revrison, 1999). Pengertian pengawasan fungsional lainnya dikemukakan oleh Ihyaul (2005) yaitu pengawasan yang dilakukan aparat/unit organisasi terhadap apa saja yang menjadi batasan dalam lingkungan kewenangan yang telah ditentukan. Dengan

diterapkannya prinsip akuntabilitas serta pengawasan fungsional, maka laporan keuangan yang disajikan yang tertuang dalam APBD mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat daerah baik secara ekonomis, efisien, efektif, serta bertanggung jawab dan berdampak pada kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumatera Barat dalam empat tahun belakangan belum sekalipun mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pada tahun 2009 ditemukan ketidakwajaran terhadap penggunaan anggaran. Berdasarkan hal tersebut BPK mengeluarkan opini *disclaimer* (menolak untuk memberikan pendapat) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi Sumatera Barat. Setahun berikutnya, pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). BPK menemukan beberapa kesalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku seperti: 1) penganggaran belanja modal pada 20 SKPD yaitu sebesar Rp.48,12 Miliar, sedangkan pada realisasinya sebesar Rp.42,18 Miliar, 2) kesalahan penganggaran atas realisasi pembangunan Gedung kantor sebesar Rp.25,83 Miliar, 3) Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.6,35 Milyar atas pengerjaan kantor penghubung, 4) nilai asset tanah disajikan secara tidak wajar dan tidak konsisten sebesar Rp.27,81 Miliar, 5) penggunaan langsung retribusi daerah sebesar Rp.2,23 Miliar, dan 6) banyaknya dana bergulir yang macet sebesar Rp.8,437 Miliar yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hasil pemeriksaan BPK tersebut terdapat ketimpangan yang dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Seharusnya dengan adanya dan diterapkannya prinsip akuntabilitas serta pengawasan fungsional, dapat terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Realita yang terjadi pada lapangan yaitu masih kurangnya penerapan prinsip akuntabilitas dan mininmya fungsi pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pihak intern maupun pihak ekstern sehingga memberikan hasil yang tidak memuaskan pada pihak yang berkepentingan. Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Widya (2009), mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian mengenai pengawasan fungsional juga telah dilakukan Ade (2009) yang meneliti pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah kota Bandung dimana yang menjadi sampel pada penelitian tersebut adalah 40 pegawai Bawasda dan hasil penelitian menyatakan terdapat hubungan yang signifikan positif antara pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pada penelitian ini peneliti hanya fokus pada dua variabel independen saja yaitu akuntabilitas dan pengawasan fungsional. Variabel dependen pada penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah khususnya pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang ada di kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Payakumbuh. Berdasarkan teori, fenomena, dan fakta yang terjadi maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah" dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Metode

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota di Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *judgement sampling* dimana yang menjadi sampel adalah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) yang berada pada empat kota di Provinsi Sumatera Barat. Empat kota yang dijadikan sampel yaitu Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi dan Payakumbuh. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 40 orang pegawai DPKD Kota Padang, 35 orang pegawai DPKD Kota Padang Panjang, 30 orang pegawai DPKD Kota Bukittinggi, dan 45 orang pegawai DPKD Kota Payakumbuh. Total responden adalah sebanyak 150 orang.

Tabel 1
Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota di Sumatera Barat

No	Nama Kantor DPKD	Jumlah Pegawai	Alamat
1	DPKD Kota Padang	40	Jl. H. M. Yamin SH No. 70 Padang
2	DPKD Kota Bukittinggi	30	Jl. Sudirman No. 27 Bukit Tinggi
3	DPKD Kota Pariaman	31	Jl. Syekh Burhanudin No. 145 Pariaman
4	DPKD Kota Padang Panjang	35	Jl. Sutan Syahrir No. 178 Padang Panjang
5	DPKD Kota Payakumbuh	45	Jl. Jend. Sudirman No. 17 Payakumbuh
6	DPKD Kota Solok	35	Jl. Kapten Bahar Hamid Latang Solok
7	DPKD Kota Sijunjung	34	Jl. Ir. Juanda No. 11 Sijunjung
	Jumlah	250	

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang

Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen penelitian pada penelitian ini yaitu kuisisioner. Variabel pada kuesioner ini terdiri dari: 1)akuntabilitas, 2)pengawasan fungsional, dan 3)pengelolaan keuangan daerah. Kuisisioner memiliki beberapa pertanyaan menggunakan skala likert untuk 5 alternatif jawaban. Skor 5 (S=Selalu) 4 (SR=Sering) 3 (K=Kadangkadangkang) 2 (P=Pernah) 1 (TP=Tidak Pernah).

Tabel 2
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item Pernyataan	Acuan
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	1. Perencanaan Keuangan Daerah 2. Pelaksanaan Keuangan Daerah 3. Pelaporan Keuangan Daerah 4. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 5. Pengawasan Keuangan Daerah	1-4 4-5 6-7 8 9-10	Abdul Halim (2006) Dalam Widya (2009)
2.	Akuntabilitas (X ₁)	a. Akuntabilitas kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD b. Akuntabilitas program yang terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah c. Akuntabilitas proses yang mengalokasikan dana yang ada dalam APBD d. Akuntabilitas hukum dan peradilan dalam penggunaan dana publik.	1-3 4-6 8-9 10	Mahsun (2006) dalam Widya (2009)
3.	Pengawasan Fungsional (X ₂)	1. Pengawasan BPK 2. Pengawasan Inspektorat Jendral Departemen 3. Pengawasan APIP 4. Wewenang aparat pengawas fungsional. 5. tolok ukur penilaian pihak yang diawasi.	1-4 5 6 7 8	Revrisond (1999)

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas, digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Pada uji validitas ini menggunakan *Corrected Product Moment*. Suatu indikator dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar dari t tabel dan bernilai positif. Telah dilakukan *pilot test* terhadap 30 orang mahasiswa jurusan akuntansi UNP dengan konsentrasi sector public yang telah mengambil mata kuliah keuangan negara dan daerah. Didapat r_{tabel} sebesar 0,361 yang menunjukkan $r_{hitung} > r_{tabel}$ dimana kuisisioner yang digunakan telah dapat dikatakan valid.

Tabel 3
Correct item-Total Correlation Instrumen Penelitian Pilot Test

INSTRUMEN PENELITIAN	NILAI <i>Correct item-Total Correlation</i> TERKECIL
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,403
Akuntabilitas (X ₁)	0,380
Pengawasan Fungsional (X ₂)	0,361

Sumber: Data olahan

2. Uji Reliabilitas, merupakan alat ukur kuisisioner dari indikator suatu variabel. Kuisisioner dinyatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan selalu stabil atau konstan. Uji realibilitas pada penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* (α) dimana ketika nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 maka variabel tersebut dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4
Nilai Cronbach's Alpha Instrumen Penelitian

INSRUMEN VARIABEL	NILAI <i>CRONBACH'S ALPHA</i>
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,882
Akuntabilitas (X ₁)	0,881
Pengawasan Fungsional (X ₂)	0,893

Sumber: Data olahan

Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui data yang digunakan apakah telah memenuhi ketentuan dalam model regresi maka diperlukan uji asumsi klasik yang meliputi :

1. Uji Normalitas Residual, uji normalitas pada penelitian ini menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* guna melihat tingkat signifikansi sebesar 5%. Data dikatakan berdistribusi normal jika *probability asymp.sig (2-tailed)* > 0,05
2. Uji Heterokedastisitas, uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke residual satu pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan uji *glejser*. Apabila *sig* > 0,05 maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.
3. Uji Multikolenearitas, untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi pada variabel bebas maka perlu dilakukan pengujian uji multikolenearitas.

Teknik Analisis Data

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2), untuk mengukur sejauh mana kemampuan suatu model menerangkan variasi variabel dependen maka diperlukan uji koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$).
2. Analisis Regresi Berganda, setelah semua data dikumpulkan maka dilakukan pengolahan data menggunakan alat Analisa regresi berganda dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Alat analisis regresi berganda ini juga digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah : $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$
Keterangan : Y = Pengelolaan Keuangan Daerah; a = Konstanta; b_1, b_2 = Koefisien regresi variabel independen; x_1 = Akuntabilitas; x_2 = Pengawasan Fungsional; e = error
3. Uji F, untuk menguji variabel yang digunakan telah fix/tidak serta menguji secara bersamaan apakah variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen secara baik maka diperlukan untuk melakukan uji F dengan tingkat kepercayaan pengujian hipotesis sebesar 95% atau (α)=0,05.
4. Uji t (t-test), uji t perlu dilakukan guna mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada persamaan regresi linear berganda secara parsial.

Tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kesimpulan untuk hipotesis pada H_1H_2 , berdasarkan :

- a. Hipotesis dapat diterima apabila tingkat signifikansi $\leq \alpha = 0,05, t_{hitung} > t_{tabel}$, koefisien β positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dan pengawasan fungsional memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- b. Hipotesis ditolak jika tingkat signifikansi $\leq \alpha = 0,05, t_{hitung} > t_{tabel}$, koefisien β negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan jika akuntabilitas dan pengawasan fungsional tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- c. Hipotesis ditolak jika signifikansi $\geq \alpha = 0,05$, koefisien β positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hasil

Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuisisioner kepada pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Payakumbuh. kuisisioner yang disebarkan sebanyak 150 dengan total pengembalian kuisisioner sebanyak 125. Kuisisioner yang disebarkan dan dapat diolah sebanyak 90 kuisisioner. Tidak dapat dilakukan pengolahan data sebanyak 35 kuisisioner dikarenakan ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab responden yang menyebabkan kuisisioner tidak dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 5
Tingkat Pengembalian Kuisisioner

Keterangan	Jumlah
Kuisisioner yang disebarkan	150
Total kuisisioner yang kembali	125
Total kuisisioner yang disebarkan dan dapat diolah	90
Respon Rate	60%

Sumber: Data olahan

Demografi Responden

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. Pada tabel dibawah ini terlihat bahwa responden lebih didominasi oleh perempuan dengan jumlah 50 orang atau sebesar 55,6%.

Tabel 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	50	55.6%
Laki-laki	40	44.4%
Jumlah	90	100%

Sumber: Data olahan

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan. Pada penelitian ini terdapat 5 kategori jenjang Pendidikan responden yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas / yang sederajat, Diploma tingkat 3 (D-3), Strata tingkat 1 (S-1), Strata tingkat 2 (S-2), Strata tingkat 3 (S-3). Tingkat Pendidikan responden terbanyak yaitu dengan jenjang Pendidikan S1 sebesar 59 responden atau 65,6% dan hanya sedikit sekali yang berlatar belakang Pendidikan SMA yaitu sebanyak 7 orang atau 7,8% responden.

Tabel 7
Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/sederajat	7	7,8
D3	13	14,4
S1	59	65,6
S2	11	12,2
S3	0	0
Jumlah	90	100

Sumber: Data olahan

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan pada DPKD kota didominasi oleh pegawai dengan masa kerja dibawah 5 taun dan lebih dari 10 taun. Untuk masa kerja 5-10 tahun hanya ada 13 responden.

Tabel 8
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	%
< 5 tahun	39	43.3%
5 – 10 tahun	13	14.5%
>10 tahun	38	42.2%
Total	90	100

Sumber: Data olahan

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan, responden yang paling banyak mengisi kuesioner yaitu pada usia dibawah 30 taun dengan total 35 responden atau sebesar 38,9%.

Tabel 9
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
<30	35	38.9
31-35	15	16.7
36-40	11	12.2
41-45	9	10
46-50	10	11.1
>50	10	11.1
Jumlah	90	100

Sumber: Data olahan primer

Berikut merupakan deskripsi hasil penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mendeskripsikan variabel-variabel tersebut, dapat dikategorikan dalam:

Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 10
Distribusi Frekuensi Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Item Pernyataan	Skor	Rerata	TCR	Kategori
1	APBD disusun dengan pendekatan kinerja	420	4,67	93,33	Baik
2	Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan	424	4,71	94,22	Baik
3	Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir	382	4,24	84,89	Baik
4	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	412	4,58	91,56	Baik
5	Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan di dalam peraturan daerah tentang APBD	418	4,64	92,89	Baik
6	Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan	426	4,73	94,67	Baik
7	Laporan keuangan dapat dimengerti dan disajikan sesuai ketentuan standar akuntansi yang diterima umum	424	4,71	94,22	Baik
8	Setiap pejabat pengelolaan keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik	417	4,63	92,67	Baik
9	Dilakukannya <i>finansial audit</i> terhadap laporan keuangan daerah	410	4,56	91,11	Baik
10	Dilakukan <i>value for money audit</i> terhadap laporan keuangan daerah	393	4,37	87,33	Baik
	Rerata	412,6	4,58	91,69	Baik

Sumber: Data olahan

Akuntabilitas

Tabel 11
Distribusi Frekuensi Akuntabilitas

No.	Item pernyataan	Skor	Rerata	TCR	Kategori
1	Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD	435	4,83	96,67	Baik
2	Pemerintah daerah memberikan laporan tahunan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada DPRD	427	4,74	94,89	Baik
3	Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan public	417	4,63	92,67	Baik
4	Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat mendapat output maksimal	411	4,57	91,33	Baik
5	Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa pengguna anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan public	401	4,46	89,11	Baik
6	Pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (publik)	389	4,32	86,44	Baik
7	Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil yang ditetapkan	398	4,42	88,44	Baik
8	Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku	414	4,60	92	Baik
9	Penggunaan dana anggaran didasarkan atas peraturan daerah serta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan	417	4,63	92,67	Baik
10	Audit kepatuhan (<i>compliance audit</i>) dilakukan agar setiap pengguna dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku	397	4,41	88,22	Baik
	Rerata	410,6	4,56	91,24	Baik

Sumber: Data olahan

Pengawasan Fungsional

Tabel 12
Distribusi Frekuensi Pengawasan Fungsional

No.	Item Pernyataan	Skor	Rerata	TCR	Kategori
1	Aparat pengawasan fungsional melakukan pemeriksaan berkala rutin atas laporan pelaksanaan anggaran (baik dengan perbandingan maupun menccek kelapangan).	419	4,66	93,11	Baik
2	BPK melakukan pemeriksaan keuangan dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangannya	377	4,19	83,78	Baik
3	BPK melakukan penilaian tentang dayaguna dan kehematan dalam penggunaan sarana yang tersedia dalam bekerja.	370	4,11	82,22	Baik
4	BPKP melaksanakan penilaian terhadap hasilguna dan manfaat yang direncanakan berupa suatu program setelah diwujudkan	367	4,08	81,56	Baik
5	Inspektorat jendral departemen dan APIP melakukan pengawasan terhadap satuan unit kerja secara objektif.	371	4,12	82,44	Baik
6	Aparat pengawas fungsional menyampaikan hasil pengawasannya secara cepat dan tepat waktu.	381	4,23	84,67	Baik
7	Aparat pengawas fungsional tidak menggunakan wewenang untuk menakut-nakuti dan mengancam pihak yang dinilai.	380	4,22	84,44	Baik
8	Aparat pengawas fungsional memiliki tolak ukur yang tepat dalam menilai pihak yang diawasinya.	403	4,48	89,56	Baik
	Rerata	383,5	4,26	85,22	Baik

Sumber: Data olahan

Uji Validitas

Pengujian sampel dilakukan terhadap 4 (empat) DPKD yang ada di Kota Padang, Padang Panjang, Bukittingi, dan Payakumbuh dengan total responden sebanyak 90 orang. Untuk mengetahui validitas masing-masing item yang ada pada kuesioner maka digunakan *Correct item- Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, r_{tabel} untuk $n = 90$ adalah 0,1745. Hasil olahan data menunjukkan bahwa variabel X_1, X_2 dan Y semua di atas r_{tabel} sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel X_1, X_2 dan Y dinyatakan valid.

Tabel 13
Correct item-Total Correlation Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN	NILAI <i>Correct item-Total Correlation</i> TERKECIL
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,208
Akuntabilitas (X1)	0,207
Pengawasan Fungsional (X2)	0,349

Sumber: Data olahan

Uji Reliabilitas

Jika koefisien keandalan mendekati 1,0 maka realibilitas instrument semakin baik. Nilai variabel dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* dari setiap instrumen lebih besar adari 0,6.

Tabel 14
Nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing Instrumen Penelitian

INSTRUMEN VARIABEL	NILAI <i>CRONBACH'S ALPHA</i>
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,727
Akuntabilitas (X1)	0,677
Pengawasan Fungsional (X2)	0,799

Sumber: Data olahan

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Residual

Normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *one sample kolmogrov-smirnov test*, dimana suatu data dikatakan berdistribusi secara normal jika nilai *asym.sig (2-tailed) > 0,05*. Hasil uji normalitas pada tabel 15 menunjukkan jika nilai *asym.sig (2-tailed)* menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 yaitu 0,291 dan dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi secara normal sebagaimana dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 15
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.12462352
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.040
	Negative	-.103
Kolmogorov-Smirnov Z		.981
Asymp. Sig. (2-tailed)		.291

Sumber: Data olahan

Uji Multikolinearitas

Untuk menguji apakah terdapat multikolinearitas dapat dilihat dengan *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* > 0.1. untuk variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai VIF < 10 yaitu 1.008 dan nilai tolerance > 0.1 yaitu 0.992, begitupun dengan variabel pengawasan fungsional (X2) memiliki VIF < 10 yaitu 1.008 dan nilai tolerance > 0.1 yaitu sebesar 0.992. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel bebas antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau dengan kata lain variabel independen pada penelitian ini bebas multikol yang tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 16
Uji Multikolonearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Akuntabilitas	.992	1.008
Pengawasan Fungsional	.992	1.008

Sumber: Data olahan

Uji Heterokedastisitas

Uji *Glejser* digunakan pada penelitian ini guna mendeteksi heterokedastisitas. Pada uji ini, jika hasilnya menunjukkan sig > 0.05 maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadinya heterokedastisitas. Pada uji ini didapat nilai sig untuk variabel akuntabilitas sebesar 0.115 dan 0.361 untuk variabel pengawasan fungsional. Maka dapat dinyatakan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17
Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.132	2.327		2.636	.010
Akuntabilitas	-.074	.046	-.168	-1.592	.115
Pengawasan Fungsional	-.032	.034	-.097	-.919	.361

Sumber: Data olahan

Hasil Analisis Data

Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R Square* pada penelitian ini 0,375. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel akuntabilitas dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 37,5% dan sisanya yaitu 62,5% ditentukan oleh faktor lain seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18
Adjusted R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.624 ^a	.389	.375	2.14891

Sumber: Data olahan

Model Analisis

Guna mengungkap pengaruh variabel yang menjadi hipotesis pada penelitian ini maka perlu dilakukan analisis regresi berganda yang terdiri dari 2 variabel bebas : akuntabilitas (x1) dan pengawasan fungsional (x2) dan variabel terikat yaitu pengelolaan keuangan daerah (y). Berikut hasil olahan data yang menjadi dasar pembentukan penelitian ini

Tabel 19
Koefisien Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.322	3.974		4.107	.000
Akuntabilitas	.520	.079	.554	6.585	.000
Pengawasan Fungsional	.170	.059	.243	2.885	.005

Sumber: Data olahan

Berdasarkan Tabel 19 diatas maka masing-masing variabel disubstitusikan dalam estimasi berikut: $Y = 16,322 + 0,520X_1 + 0,170X_2$

Keterangan : Y : Pengelolaan Keuangan Daerah; X1 : Akuntabilitas; X2 : Pengawasan Fungsional

Uji F

Nilai sig pada tabel 20 menunjukkan angka 0,000^a yang berarti variabel independen memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini model yang digunakan untuk menguji uji f statistik yaitu model fit yang berfungsi untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Tabel 20
Uji F hitung

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	256.074	2	128.037	27.727	.000 ^a
Residual	401.748	87	4.618		
Total	657.822	89			

Sumber: Data olahan

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis 1 dilakukann dengan melakukan perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig < \alpha 0,05$ maka hipotesis dapat diterima. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,6702. Pada variabel akuntabilitas (X1) nilai t_{hitung} yaitu 6,585 dan nilai sig adalah 0,000 dan koefisien β positif sebesar 0,520. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $6,585 > 1,6702$ dan nilai signifikansi $0,006 < \alpha 0,05$. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa variabel x1 yaitu akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga hipotesis 1 ini dapat diterima. Uji pada hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha 0,05$ maka hipotesis dapat diterima. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,6702. Untuk variabel pengawasan fungsional (X2) nilai t_{hitung} adalah 2,885 dan nilai sig adalah 0,005 dan koefisien β positif sebesar 0,170. Dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,885 > 1,6702$ dan nilai signifikansi $0,005 < \alpha 0,05$. Berdasarkan hal tersebut maka pengawasan fungsional (x2) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga hipotesis 2 ini dapat diterima.

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah Pada data distribusi terlihat hasil jawaban 90 responden dimana responden tersebut setuju bahwa setiap pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat dengan TCR yang baik sekitar 96,67%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jika pengawasan fungsional dilakukan secara

baik maka pengelolaan keuangan daerah juga akan membaik yang akan berdampak pada peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Terhadap Keuangan Daerah adalah sebagai berikut : 1) Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. 2) Pengawasan Fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, 2000. *Manajemen Keuangan Daerah* Edisi Pertama, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah* Edisi Pertama, Salemba empat, Jakarta.
- Abdul Halim. 2007. *Seri Bunga Rampai, Pengolahan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Ade Mulyani. 2009. Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. FE Universitas Padjajaran. Bandung.
- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah* Edisi pertama Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Yani, 2004. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta 2004.
- Ahmad Yani. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dina Handayani. 2008. Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. FE Universitas Widyatama. Bandung.
- Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahsun Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no.59 tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Refnaldi. 2011. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi* FE Universitas Negeri Padang. Padang.
- Revrison Baswir, 2005 *Akuntansi Pemerintah Indonesia*, Yogyakarta :BPFE.
- Widya Sari. 2009. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi* FE Universitas Negeri Padang. Padang.